



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
UNIT KERJA : KANTOR MANAJEMEN STRATEGIS DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 434082

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.625.666.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/190 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah Seluas 1667 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
3. Tanah Seluas 1110 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/130 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.666.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 950.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 78.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 25.716.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 3.572.966.103**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 1.473.939.610**

Sub Total **Rp. 10.726.287.713**

III. HUTANG **Rp. 1.817.156.386**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 8.909.131.327**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.